

Dinamika Keamanan dan Demokrasi di Indonesia

Syarifah Huriyah

Universitas Alauddin, Makassar
e-mail: syarifahhuriyah18@gmail.com

Karunia Hazyimara

Universitas Alauddin, Makassar
e-mail: karuniahaz@gmail.com

Syarifah Zuhairah

Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
e-mail: zuhairahsyarifah@gmail.com

Abstract

This article discusses the challenges faced by the South Sulawesi Police in the context of the dynamics of security and democracy in Indonesia ahead of the 2024 Regional Head Elections (Pilkada). The post-Cold War era and the rise of new global powers have influenced the democratization process in various countries, including Indonesia, which has experienced a significant democratic transition after the 1998 Reformation. However, this process also presents challenges such as radicalization, social polarization, and conflict that are often exploited by political actors. In the scientific oration of the South Sulawesi Police Chief at the 107th Graduation Ceremony of UIN Alauddin Makassar with the theme "Challenges of the Police in Facing the Era of Democracy (Pilkada Era), the importance of community policing and proactive policing approaches in maintaining security stability and preventing social conflict was emphasized. This study uses a descriptive qualitative method with literature study and analysis of oration texts to identify the main challenges faced by the Police. The results of the study indicate that geopolitical changes, social inequality, and potential conflicts due to sensitive issues are factors that need to be addressed. This article recommends improving political education, community involvement, and conflict mitigation strategies to create a healthy and stable democratic climate in Indonesia.

Keywords: *Security dynamics, challenges for the Indonesian Police, Indonesian Democracy*

A. Pendahuluan

Dalam konteks global, era pasca-Perang Dingin telah membawa perubahan signifikan dalam tatanan geopolitik dan ekonomi dunia. Runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an menandai berakhirnya sistem bipolar dunia, dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan superpower yang dominan. Namun, kebangkitan negara-negara seperti China dan Rusia di bidang ekonomi dan militer telah menciptakan keseimbangan baru, yang mempengaruhi dinamika internasional, termasuk gelombang demokratisasi dan penguatan hak asasi manusia (HAM). Demokratisasi ini, sebagaimana dijelaskan oleh Huntington (1993) dalam *The Clash of Civilizations*, telah mengalami pasang surut di berbagai wilayah, termasuk di Asia, Timur Tengah, dan Afrika, yang melahirkan tantangan baru bagi stabilitas politik domestik negara-negara berkembang (Umar Suryadi Bakry, 2022).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, juga mengalami transisi demokrasi yang signifikan. Setelah era Reformasi 1998, demokrasi di Indonesia telah memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan pertumbuhan masyarakat sipil (Ahmad Muhajir & Febriyantika Wulandar, 2023). Namun, transisi ini tidak lepas dari tantangan. Gelombang demokrasi yang pada satu sisi dianggap membawa angin segar bagi kebebasan politik, di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif seperti radikalisme, anarkisme, dan polarisasi sosial yang semakin terlihat dalam kontestasi politik, termasuk dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Seiring dengan demokratisasi, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial. Berbagai fenomena konflik sosial yang muncul dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh perbedaan politik, tetapi juga oleh faktor ekonomi, agama, suku, dan ras. Polarisasi yang muncul akibat perbedaan-perbedaan tersebut sering kali dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang mencari keuntungan pragmatis, sehingga memperparah situasi konflik. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konflik-konflik ini sering kali terkait dengan ketimpangan struktural, baik dalam hal politik maupun ekonomi, yang pada akhirnya memicu kekerasan dan radikalisme di kalangan masyarakat (Iswahyudi et al., 2018).

Polri, sebagai salah satu pilar utama penegak hukum dan penjaga ketertiban di Indonesia, memegang peran strategis dalam mengantisipasi dan mengelola konflik sosial di era demokrasi (Zulkarnein Koto & Andrea H Poeloengan, 2022). Dalam pidato orasi ilmiahnya, Kapolda Sulawesi Selatan (Irfan Pol. Yudhiawan, 2024) pada wisuda Angkatan 107 UIN Alauddin Makassar menekankan pentingnya pendekatan *community policing* dan *proactive policing* dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, terutama di tengah proses demokrasi seperti Pilkada serentak yang akan datang pada November 2024. Pendekatan ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial melalui pencarian akar masalah dan solusi jangka panjang, sehingga dapat mencegah eskalasi konflik menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.

Sebagai negara dengan keberagaman yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah ancaman polarisasi sosial dan konflik yang sering kali muncul dalam konteks demokrasi (Duwi Handoko et al., 2023). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menyebutkan bahwa konflik sosial dapat bersumber dari berbagai faktor seperti masalah politik, ekonomi, agama, dan distribusi sumber daya (Prautami Sintaresmi et al., 2022). Oleh karena itu, Polri bersama dengan komponen masyarakat dan stakeholder terkait lainnya, harus mampu memetakan dan mengantisipasi sumber-sumber konflik tersebut agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Dengan semakin dekatnya Pilkada serentak 2024, dinamika politik di Indonesia semakin memanas. Isu polarisasi politik yang menguat, disertai dengan meningkatnya ujaran kebencian (*hate speech*) dan penyebaran berita bohong (*hoaks*), kini menjadi ancaman yang nyata bagi stabilitas sosial dan keamanan dalam negeri. Fenomena ini tidak hanya menguji ketahanan sosial masyarakat, tetapi juga menantang kesiapan institusi negara dalam menjaga ketertiban umum di tengah situasi yang semakin rentan terhadap konflik. Polarisasi politik, yang awalnya mungkin hanya sekadar perbedaan pandangan, dapat berkembang menjadi perpecahan yang membahayakan kerukunan sosial, terutama ketika didorong oleh isu-isu sensitif yang disebarluaskan tanpa kontrol (Faris Budiman Annas et al., 2019).

Dalam konteks ini, Polri memiliki peran penting dalam memitigasi dampak dari fenomena tersebut. Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional, Polri diharuskan untuk memperkuat kemampuan deteksi dini (*early warning*) untuk mengidentifikasi potensi konflik sebelum berkembang menjadi ancaman yang serius. Pendekatan ini mencakup pengumpulan intelijen yang lebih intensif serta analisis mendalam terhadap dinamika sosial dan politik yang terjadi di masyarakat. Selain itu, langkah-langkah preventif, seperti kampanye anti-hoaks dan pendidikan publik mengenai bahaya ujaran kebencian, juga perlu diintensifkan. Pendekatan yang proaktif ini penting untuk mengurangi risiko eskalasi konflik sosial yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada dengan damai.

Lebih jauh, strategi Polri dalam menghadapi tantangan ini tidak bisa hanya bersifat reaktif, tetapi harus mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan media massa. Dalam situasi yang kompleks ini, peran media sangat krusial dalam menyajikan informasi yang berimbang serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kedamaian selama proses politik berlangsung (Naura Yusro & Ririn Puspita, 2023). Kolaborasi yang sinergis ini diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk menjaga stabilitas nasional serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara dalam menghadapi ancaman polarisasi politik dan hoaks di tahun politik ini.

Pidato atau orasi ilmiah ini memberikan penekanan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia di era demokrasi modern adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan stabilitas keamanan. Dalam konteks ini, Polri harus mampu mengelola potensi konflik sosial yang muncul akibat euforia demokrasi, dan pada saat yang sama menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman sosial yang ada. Oleh karena itu, pendekatan proaktif yang melibatkan masyarakat, deteksi dini, serta penanganan yang cepat dan efektif harus terus dikedepankan guna menjaga stabilitas keamanan, terutama menjelang Pilkada serentak 2024.

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang memberikan hak suara kepada rakyat untuk menentukan nasib mereka, sehingga mengharuskan adanya partisipasi aktif dari masyarakat (Ichwansyah Tampubolon, 2023). Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, memasuki era reformasi yang ditandai dengan

euforia demokrasi (Yusqi Alfian et al., 2019). Namun, perjalanan menuju demokrasi yang matang tidaklah mulus. Sejumlah tantangan, termasuk konflik sosial, kekerasan politik, dan fenomena intoleransi, semakin mengemuka, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024.

Dalam kajian literatur sebelumnya, para peneliti seperti Samuel R. Huntington dan Francis Fukuyama telah mengemukakan bahwa proses demokratisasi di berbagai negara sering kali mengalami pasang surut, dengan munculnya kembali rezim otoriter di tengah gelombang demokrasi yang menguat. Huntington, dalam bukunya *The Clash of Civilizations*, menyampaikan keraguan akan keberlangsungan demokrasi, sementara Fukuyama merayakan keruntuhan Uni Soviet sebagai kemenangan demokrasi liberal (Samuel R. Huntington, 2020). Dalam konteks Indonesia, transisi demokratisasi pasca-1998, meskipun berhasil mendorong kebebasan berpolitik dan memperkuat peran masyarakat sipil, tetap menghadapi tantangan dalam hal toleransi sosial dan kesenjangan ekonomi.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada analisis yang mendalam terhadap tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam konteks demokrasi yang berkembang di Indonesia. Dengan memanfaatkan orasi Kapolda Sulawesi Selatan, yang menyoroti isu-isu krusial terkait keamanan dan stabilitas sosial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana institusi kepolisian dapat berperan secara proaktif dalam mencegah konflik dan menjaga keamanan publik dalam era demokrasi.

Permasalahan penelitian ini mencakup pertanyaan-pertanyaan kunci, seperti: Apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah dinamika demokrasi? Bagaimana cara Polri menerapkan konsep *community policing* dan *proactive policing* dalam konteks masyarakat yang beragam? Dan, sejauh mana dampak dari tantangan tersebut terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam konteks demokrasi, serta mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalisir potensi konflik sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan teori dan praktik keamanan di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi yang relevan bagi kebijakan publik dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan mendorong kematangan demokrasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tantangan Polri dalam konteks demokrasi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika yang terjadi dalam masyarakat, serta interaksi antara Polri dan elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (literature study) yang mengandalkan sumber-sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, laporan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan demokrasi, keamanan, dan peran Polri. Penelitian ini juga mengacu pada orasi ilmiah Kapolda Sulawesi Selatan pada wisuda Angkatan 107 UIN Alauddin Makassar sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan (Hardani et al., 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui langkah studi literatur yaitu Mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dari berbagai sumber, termasuk buku dan artikel yang membahas demokrasi, keamanan, dan kepolisian di Indonesia (Rina Hayati, 2022). Studi ini akan membantu mengidentifikasi teori-teori yang telah ada sebelumnya serta mengkaji pandangan para ahli terkait tantangan demokrasi dan keamanan. Langkah selanjutnya adalah analisis teks yaitu menganalisis teks orasi ilmiah Kapolda Sulawesi Selatan untuk mengidentifikasi poin-poin kunci yang berkaitan dengan tantangan Polri dalam menjaga keamanan di era demokrasi. Analisis ini akan dilakukan dengan pendekatan hermeneutika untuk memahami makna yang terkandung dalam pernyataan Kapolda.

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis akan dilakukan melalui pengkodean, pengelompokan tema, dan interpretasi. Pertama, Mengidentifikasi tema-tema utama dari literatur dan orasi ilmiah yang relevan, kemudian memberikan kode pada bagian-bagian yang berkaitan dengan tantangan keamanan dan demokrasi. Kedua, Mengelompokkan kode-kode yang telah ditentukan ke dalam tema yang lebih besar untuk memberikan struktur pada analisis. Tema-tema ini dapat mencakup tantangan konflik sosial,

peran Polri dalam pencegahan konflik, dan dampak demokrasi terhadap stabilitas keamanan.

Ketiga, Menginterpretasikan hasil analisis untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meminimalisir potensi konflik sosial. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam konteks demokrasi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendukung stabilitas keamanan di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap pidato Kapolda Sulawesi Selatan, terdapat beberapa poin kunci yang dapat diidentifikasi terkait dengan dinamika keamanan dan tantangan demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Poin Kunci	Deskripsi
1	Perubahan Geopolitik dan Pengaruh Globalisasi	Dunia mengalami perubahan tatanan global pasca-runtuhnya Uni Soviet. Kebangkitan China dan Rusia memengaruhi demokrasi Indonesia melalui tuntutan globalisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
2	Dinamika Demokratisasi di Indonesia	Era Reformasi 1998 membawa ruang kebebasan berpolitik, tetapi tantangan seperti intoleransi, radikalisasi, dan kekerasan politik menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dewasa dalam berdemokrasi.
3	Persoalan Sosial dan Ekonomi dalam Konteks Demokrasi	Demokrasi yang tidak dikelola dengan baik meningkatkan ketimpangan sosial, konflik antar-kelompok, dan ketidakadilan ekonomi, menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi harus diukur melalui keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, bukan hanya proses pemilu.

Table 1. Poin Kunci Identifikasi Dinamika Keamanan dan Tantangan Demokrasi Indonesia

Sumber: Olahan Penulis

1. Geopolitik dan Implikasinya Terhadap Globalisasi

Perubahan geopolitik dan pengaruh globalisasi cukup menarik jika ditelaah lebih mendalam, sama seperti yang dikemukakan oleh Kapolda Sulawesi Selatan menggarisbawahi bahwa setelah runtuhnya Uni Soviet, dunia mengalami perubahan geopolitik yang signifikan, mengarah pada dominasi Barat, terutama Amerika Serikat. Namun, kebangkitan negara-negara seperti China dan Rusia dalam aspek ekonomi dan militer menunjukkan adanya potensi perubahan kembali dalam tatanan global. Hal ini menjadi penting dalam konteks demokrasi di Indonesia, di mana pengaruh globalisasi mendorong tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Samuel R Huntingtons, 2022).

Penelitian ini mencatat bahwa Indonesia mengalami transisi demokrasi yang dimulai sejak era Reformasi 1998. Meskipun transisi ini memberikan banyak ruang bagi kebebasan berpolitik dan partisipasi masyarakat, terdapat pula tantangan yang muncul, seperti meningkatnya intoleransi, radikalisasi, dan kekerasan politik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi memberikan kesempatan, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dewasa dalam berdemokrasi.

Kemudian persoalan sosial dan ekonomi dalam konteks demokrasi juga semakin menguat. Kapolda Sulawesi Selatan juga mengemukakan bahwa demokrasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketimpangan sosial, seperti meningkatnya indeks Gini dan konflik antara kelompok masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari proses pemilihan, tetapi juga dari keadilan sosial dan pemerataan ekonomi

Dalam konteks Pilkada 2024, hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi konflik yang dapat timbul akibat politisasi isu-isu sensitif, seperti suku, agama, dan etnis. Pemanfaatan isu-isu ini dalam kampanye politik dapat memperparah polarisasi masyarakat dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

Kapolda Sulawesi Selatan menekankan pentingnya peran Polri dalam mencegah dan menangani konflik sosial yang mungkin terjadi. Konsep *community policing* dan *proactive policing* menjadi pendekatan yang ditekankan dalam menjaga stabilitas keamanan. Hal ini sejalan dengan teori mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Globalisasi dan perubahan geopolitik telah membentuk lanskap demokrasi Indonesia dalam dua dekade terakhir, membawa pengaruh yang mendalam terhadap berbagai aspek sosial, politik, dan ekonomi. Di satu sisi, globalisasi membuka akses terhadap ide-ide dan praktik demokrasi global, yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintah (Sofwan, 2022). Penguatan nilai-nilai demokrasi ini, terutama dalam konteks pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif, dapat menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi stabilitas politik dalam jangka panjang. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus, karena globalisasi juga membawa ekspektasi dan tekanan dari aktor-aktor internasional yang dapat menciptakan ketegangan baru di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

Namun, di sisi lain, efek globalisasi juga sering kali memicu masalah yang lebih kompleks, seperti ketimpangan sosial yang semakin mencolok serta gesekan antar kelompok yang berbeda. Distribusi kekayaan dan kesempatan yang tidak merata dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, yang jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi memperparah konflik sosial. Berbagai kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan cenderung lebih rentan terhadap radikalisme atau terpengaruh oleh propaganda yang bertujuan memecah belah persatuan bangsa. Hal ini menguji ketahanan sosial serta kemampuan institusi negara dalam meredam potensi konflik yang dapat mengancam integritas demokrasi Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan ini, peran Polri menjadi sangat vital, khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai pengayom masyarakat sekaligus penjaga stabilitas keamanan. Polri dituntut untuk memiliki strategi yang responsif dan adaptif dalam menghadapi gejolak sosial yang kerap kali menyertai proses demokratisasi. Selain pendekatan hukum dan penegakan keamanan, Polri perlu mengadopsi pendekatan yang lebih preventif dan berbasis kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid antara Polri, pemerintah, dan masyarakat sipil, diharapkan tantangan yang timbul dari globalisasi dan perubahan geopolitik ini dapat diatasi, sekaligus mengarahkan Indonesia menuju demokrasi yang lebih inklusif dan stabil.

Globalisasi dan perubahan geopolitik berperan besar dalam membentuk lanskap demokrasi Indonesia dalam dua dekade terakhir. Globalisasi membawa ide-ide demokrasi yang mengedepankan transparansi, partisipasi publik, dan

akuntabilitas, yang berkontribusi pada pemerintahan yang lebih terbuka. Namun, hal ini juga membawa tantangan, seperti ketimpangan sosial yang mengancam stabilitas sosial.

Tabel dibawah ini menunjukkan perbandingan indeks Gini Indonesia dari 2010 hingga 2023, menggambarkan ketimpangan yang meningkat meski terjadi pertumbuhan ekonomi:

Tahun	Indeks Gini	Keterangan
2010	0.41	Ketimpangan sosial menengah
2015	0.43	Peningkatan ketimpangan sosial
2020	0.42	Ketimpangan tetap tinggi
2023	0.44	Ketimpangan sosial semakin parah

Table 2. Grafik indeks Gini Indonesia 2010 hingga 2023

Sumber: BPS

2. Tantangan Demokratisasi di Indonesia

Demokratisasi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak era reformasi, ditandai dengan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dan keterbukaan dalam proses politik. Namun, kemajuan ini bukan tanpa hambatan, karena masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, salah satunya adalah ketidakdewasaan masyarakat dalam berpolitik. Di berbagai kesempatan, ketidakdewasaan ini tercermin dalam bentuk reaksi emosional yang tidak terkendali terhadap perbedaan pendapat, yang kadang berkembang menjadi tindakan anarkis. Ketidakdewasaan ini tidak hanya menghambat perkembangan demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, terutama ketika perbedaan pendapat yang seharusnya sehat berubah menjadi konflik terbuka.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa akar masalah ini sebagian besar terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya peran setiap individu dalam menjaga keharmonisan sosial. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, namun hak ini juga harus diimbangi dengan pemahaman tentang batasan dan tanggung jawab yang menyertainya. Tanpa pemahaman yang cukup, kebebasan berekspresi yang seharusnya menjadi kekuatan justru bisa menjadi bumerang yang merusak. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis yang timbul akibat ketidakdewasaan dalam berpolitik, diperlukan upaya

yang serius dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti penting dari hak dan kewajiban mereka dalam berdemokrasi.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah melalui pendidikan politik yang terstruktur dan berkelanjutan, yang dapat membentuk kesadaran masyarakat sejak dini mengenai esensi demokrasi yang sejati. Pendidikan politik ini tidak hanya penting dilakukan di institusi formal seperti sekolah, tetapi juga dalam bentuk kegiatan sosialisasi di komunitas-komunitas lokal. Dengan pendidikan politik yang baik, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa berdemokrasi bukan hanya tentang kebebasan untuk memilih atau berpendapat, tetapi juga tentang kemampuan untuk menerima perbedaan dan menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini diyakini dapat membentuk masyarakat yang lebih dewasa dalam berpolitik, sehingga demokrasi di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan stabil (Iyep Candra Hermawan, 2020)

Demokratisasi Indonesia menghadapi hambatan signifikan, termasuk ketidakdewasaan politik masyarakat yang tercermin dalam reaksi emosional yang berujung pada anarkisme. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendidikan politik yang berkelanjutan guna membentuk pemahaman tentang hak dan kewajiban demokrasi.

Peraturan	Deskripsi	Implikasi dalam Penelitian
UU No. 2 Tahun 2002	Undang-Undang Polri	Menetapkan peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban
Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2007	Pedoman Community Policing	Menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam keamanan
Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019	Proactive Policing	Fokus pada pencegahan dan deteksi dini terhadap ancaman

Table 3. Peraturan Terkait Tupoksi Lembaga Polri

Sumber: Olahan Penulis

3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Kenaikan indeks Gini yang terjadi di Indonesia menjadi indikator yang mengkhawatirkan, karena menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan sosial di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut. Indeks Gini yang tinggi mencerminkan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan, di mana sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok

masyarakat. Kondisi ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berhasil menyentuh semua lapisan masyarakat secara adil, sehingga menciptakan jurang yang semakin lebar antara kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan yang terus meningkat ini tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga mengandung risiko bagi stabilitas sosial yang lebih luas. Kesenjangan sosial yang semakin melebar ini berpotensi memicu konflik sosial yang lebih dalam, terutama di kalangan masyarakat yang merasa tertinggal atau termarjinalkan. Ketidakadilan struktural yang menjadi akar dari ketimpangan ini sering kali memberikan celah bagi elit politik untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat kelas bawah, mereka dapat memperkuat posisi atau meningkatkan pengaruh politiknya melalui retorika populis yang sering kali memperkeruh keadaan. Siklus ketidakpuasan yang dihasilkan dari ketidakadilan ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi radikalisme di kalangan masyarakat bawah (Nurul Bariyah, 2022).

Untuk itu, reformasi ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial menjadi suatu keharusan guna mengurangi ketimpangan yang ada. Kebijakan ekonomi perlu dirancang agar lebih inklusif dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta program jaminan sosial yang menyeluruh. Selain itu, langkah-langkah seperti peningkatan upah minimum, dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM), dan kebijakan pajak yang progresif dapat membantu mempersempit jurang ketimpangan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kenaikan indeks Gini yang menggambarkan ketimpangan sosial yang semakin lebar menjadi tantangan besar. Hal ini berpotensi memperburuk konflik sosial, terutama di kalangan masyarakat yang merasa termarjinalkan.

4. Ancaman Polarisasi dan Intoleransi

Pilkada serentak yang akan datang membawa tantangan tersendiri bagi stabilitas sosial di Indonesia, karena berpotensi meningkatkan polarisasi di tengah masyarakat. Di tahun-tahun politik, perbedaan pandangan sering kali meruncing, dan di saat seperti inilah politisi cenderung mengangkat isu-isu sensitif demi memenangkan hati pemilih. Namun, penggunaan isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat ini dapat menciptakan suasana ketegangan yang berbahaya bagi keutuhan sosial bangsa. Polarisasi yang muncul akibat retorika politik yang memecah belah tidak hanya mengancam kerukunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik horizontal di berbagai daerah.

Upaya untuk mengurangi polarisasi tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya pada saat kampanye berlangsung, melainkan harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan. Salah satu cara yang efektif adalah melalui kampanye positif yang berfokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya persatuan dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kampanye ini harus mampu menanamkan kesadaran bahwa perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memutuskan tali persaudaraan. Melalui pendekatan yang edukatif dan inklusif, diharapkan masyarakat akan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan politik, serta memahami bahwa tujuan utama pemilu adalah memilih pemimpin terbaik, bukan merusak hubungan sosial yang sudah terjalin.

Lebih jauh, hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mendorong kampanye positif ini, mulai dari pemerintah, media massa, hingga tokoh masyarakat. Kolaborasi yang sinergis antara institusi negara dan masyarakat sipil akan memperkuat upaya menciptakan suasana politik yang sehat dan kondusif. Dengan mempromosikan narasi yang mengedepankan persatuan dan toleransi, kita dapat meminimalkan dampak negatif dari polarisasi, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih dewasa dalam berpolitik. Pendekatan ini diyakini mampu menjaga keharmonisan sosial, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi Indonesia di tengah tantangan polarisasi yang terus meningkat.

Pilkada dan Pemilu di Indonesia sering kali menimbulkan polarisasi politik yang mendalam. Upaya untuk mengurangi polarisasi harus dimulai dengan kampanye edukasi yang menekankan pentingnya toleransi dan persatuan. Grafik dibawah ini menunjukkan tingkat polarisasi politik Indonesia menjelang Pemilu/Pilkada, yang dapat memperburuk ketegangan sosial.

Tahun	Indeks Polarisasi	Keterangan
2014	0.55	Peningkatan polarisasi menjelang Pemilu
2019	0.60	Memuncaknya polarisasi selama Pemilu
2024	0.58	Polarisasi politik masih tinggi menjelang Pilkada

Table 4. Grafik Polarisasi Politik di Indonesia

Sumber: Olahan peneliti

5. Strategi Polri dalam Penanganan Konflik

Polri memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi, terutama dalam menghadapi potensi konflik yang sering muncul di tahun-tahun politik. Dalam situasi yang sensitif seperti pemilu, di mana perbedaan pendapat dan persaingan politik dapat memicu ketegangan, kehadiran Polri yang profesional dan netral menjadi fondasi bagi terciptanya proses demokrasi yang aman dan damai. Sebagai penegak hukum, Polri bertugas tidak hanya untuk meredam konflik, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak demokratis warga negara terlindungi. Peran ini menjadi semakin kompleks ketika ancaman terhadap keamanan berkembang, menuntut Polri untuk memiliki pendekatan yang lebih strategis dan inovatif.

Pendekatan *community policing* yang diadopsi Polri merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menjaga stabilitas dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Yoserwan, 2023). Dengan pendekatan ini, Polri tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban. Kolaborasi yang erat antara Polri dan masyarakat dapat membangun kepercayaan publik yang lebih kuat, yang pada gilirannya akan membantu meredakan ketegangan sosial yang mungkin muncul. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman akan mengurangi ketergantungan pada penegakan hukum yang represif dan lebih berfokus pada pencegahan serta solusi berbasis komunitas.

Selain community policing, Polri juga menerapkan strategi proactive policing, di mana tindakan pencegahan menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi ancaman serius, dengan mengandalkan analisis intelijen dan deteksi dini terhadap berbagai tanda-tanda kerawanan. Dengan pendekatan yang proaktif, Polri dapat melakukan intervensi lebih awal dan menurunkan risiko konflik yang bisa muncul dari perselisihan politik atau isu-isu sensitif lainnya. Melalui kombinasi strategi community policing dan proactive policing.

Peraturan	Deskripsi	Implikasi dalam Penelitian
UU No. 2 Tahun 2002	Undang-Undang Polri	Menetapkan tupoksi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban
Peraturan Kapolri No.24 Tahun 2007	Pedoman Community Policing	Menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam keamanan
Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019	Proactive Policing	Fokus pada pencegahan dan deteksi dini terhadap ancaman

Table 5. Tabel Peraturan Polri yang Mendasari Strategi
Sumber: Olahan Penulis

Polri diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan demokrasi yang sehat, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Peran Polri sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama menjelang tahun-tahun politik yang penuh ketegangan. Polri mengadopsi strategi community policing dan proactive policing untuk meredam potensi konflik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dinamika keamanan dan tantangan demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang Pilkada 2024, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik dari perspektif global maupun lokal. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perubahan geopolitik yang signifikan, meningkatnya ketimpangan sosial, serta potensi konflik yang muncul akibat polarisasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam proses demokratisasi.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian ini, beberapa saran diberikan oleh penulis untuk menjaga demokrasi Indonesia, yaitu : peningkatan pendidikan politik, strategi mitigasi konflik, keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, peningkatan keadilan sosial, dan saran untuk penelitian lanjutan agar dapat mengeksplorasi dampak dari isu-isu baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, seperti pengaruh teknologi informasi dan media sosial terhadap demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, and Asep Aji Pramayoga. "Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial Public Opinion of Political Polarization on Social Media." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 20, no. 2 (2019).
- Bakry, Umar Suryadi. "STUDI KEAMANAN INTERNATIONAL PASCA PERANG DINGIN." *Journal of Economic Perspectives* 2, no. 1 (2022).
- Bariyah, Nurul. "Demokrasi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 21, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.23071>.
- Duwi Handoko, Beni Sukri, Hulaimi, Khairul Azwar Anas, Lewiaro Laia, and Meidizon. "Tantangan Masyarakat Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Di Tahun Politik." *JURNAL SOSIO-KOMUNIKA* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.57036/jsk.v2i1.36>.
- Fathurochman, Naura Yusro, and Ririn Puspita Tutiasri. "Penerimaan Generasi Z Terhadap Polarisasi Politik." *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2833>.
- Hardani, Nur Hikmah Aulia, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hayati, Rina. "Pengertian Penelitian Studi Literatur, Ciri, Metode, Dan Contohnya." *PenelitianIlmiah*, 2022.
- Hermawan, Iyep Candra. "IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PARTAI POLITIK DI INDONESIA." *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.35194/jpphk.v10i1.939>.
- Iswahyudi, M. S., Elshifa, A., Abas, M., Martalia, D., Mutia, A., Imlabla, F. V., ... & Manafe, D. *DASAR-DASAR MANAJEMEN SUMBER DAYA*

MANUSIA: Panduan Mengelola Organisasi Publik Dan Bisnis Menuju Kesuksesan Di Era Digital. Buku, 2018.

Koto, Zulkarnein, and Andrea H Poeloengan. "Catatan Dalam RUU KUHP Buku Kesatu Terkait Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.80>.

Muhajir, Ahmad, and Febriyantika Wulandari. "Demokrasi Oligarkis Dan Resesi Demokrasi Di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876>.

"Samuel R Huntingtons » the Clash of Civilizations and the Remaking of World Order« (1996)." *Zeithistorische Forschungen*, 2020. <https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2102>.

Sintaresmi, Prautami, Slamet Muchsin, and Rulam Ahmadi. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL." *Jurnal Academia Praja* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.889>.

Sofwan, Sofwan. "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *JATISWARA* 37, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364>.

Tampubolon, Ichwansyah. "KAMPANYE, GRATIFIKASI, DAN POLITIK TRANSAKSIONAL: DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.1013-1021>.

Thoriq, Yusqi Alfian, Dinda Ayu Eka Shinta, and Laras Sati. "Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2601>.